

## SEKOLAH DEMOKRATIS

Tabitha Lopulalan, M.Pd  
Pengawas Guru Pendidikan Agama Kristen

### **Abstract**

*In this globalization era, every country is competing to increase HDI. This is considered as an important thing, because HDI is a capital to carry out any development program in a system. Indonesia, as one of the most populous countries in the world, whether you want it or not, is currently in the flow of competition. In accordance with the results of research from researchers from the field of science that is the focus of their study, it turns out that the education sector is a system that determines the quality of the Human Development Index (HDI). This means, it is time for Indonesia to reform the education system from all levels. All components involved in the education process must be reformed. Some of the components that have received attention are the school and curriculum. These two components were reformed, so that an increase in the HDI of the Indonesian nation could be realized. One aspect of educational reform is democracy. Schools as educational institutions must implement democratic education. This must be proven through the curriculum applied in schools. So that education can answer the needs of the job market as a capital to improve the welfare of the Indonesian people, towards a just and prosperous society based on the 1945 Constitution.*

**Keywords:** *School, Curriculum, Democratic.*

### **PENDAHULUAN**

Di awal abad 21 ini, prestasi pendidikan di Indonesia tertinggal jauh di bawah negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura, Jepang, dan Malaysia, baik dalam aspek angka partisipasi pendidikan, maupun rata-rata lamanya setiap anak bersekolah. Bahkan jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang salah satu indikatornya adalah sektor pendidikan, posisi Indonesia kian menurun dari tahun ke tahun. Padahal Indonesia kini sudah menjadi bagian dari masyarakat duni yang sedang berkompetisi di era globalisasi yang semakin modern di semua sektor kehidupan yang tidak bisa dihindari. Singkatnya, Indonesia kini menjadi bagian dari kompetisi masyarakat dunia, apalagi kalau memerhatikan hasil pertemuan puncak ASEAN ke – 12 bulan Januari 2007 dengan kesepakatan untuk penciptaan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 (Kompas, 14 Januari 2007).

Konsekuensi logis dari kesempatan tersebut adalah akan terjadinya aliran perdagangan barang dan jasa lintas ASEAN tanpa bisa diproteksi oleh pemerintah negara masing-masing. Dengan demikian, seluruh IPM negara-negara ASEAN akan terlibat dalam kompetisi internal, termasuk IPM bangsa Indonesia dengan kompetitor seluruh IPM dari negara-negara ASEAN. Jika tidak bisa menjadi pemenang, maka akan menjadi yang kalah serta tertinggal dari masyarakat lainnya, khususnya dalam meraih pasar dan peluang kesempatan kerja yang tidak dibatasi oleh garis wilayah kenegaraan, tetapi bergerak kian meluas, dan kini dimulai dari wilayah Asia Tenggara yang akan terus bergerak menjadi wilayah dunia. Oleh sebab itu, penyiapan indeks pembangunan manusia yang berkualitas, kompetitif serta memiliki berbagai keunggulan komparatif menjadi sebuah keniscayaan yang mesti menjadi perhatian dalam sektor pendidikan.

Lemahnya IPM hasil pendidikan juga mengakibatkan lambannya Indonesia bangkit dari keterpurukan sektor ekonomi yang merosot secara signifikan di era globalisasi ini. Sementara negara-negara ASEAN lainnya sudah pulih dari keterpurukan mereka, Indonesia masih belum mampu melakukan *recovery* dengan baik. Dody Heriawan Priatmoko, dengan mengutip pernyataan Schutz dan Solow, menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan IPM. Hal ini dapat dilihat pada negara Jepang di mana kemajuan ekonomi yang didapatkannya sekarang sangat integral dengan peranan pendidikan. Sistem pendidikan Jepang yang baik telah menghasilkan manusia-manusia berkualitas sehingga walaupun hancur setelah kekalahan dalam Perang Dunia II, mereka dapat cepat bangkit maju dan bahkan bersaing dengan negara yang mengalahkannya dalam perang. Negara Asia lainnya seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura juga memperlihatkan fenomena yang tidak jauh berbeda dari negeri matahari terbit ini, di mana kemajuan ekonomi yang mereka dapatkan adalah karena tingginya kualitas IPM-nya. Keadaan di Indonesia berbeda jauh sekali dengan negara-negara tersebut. Dengan kekayaan sumber daya alam yang relatif lebih banyak, negara kita ternyata jauh tertinggal (Priatmoko, 2003:1). Semuanya itu merupakan akibat dari kekeliruan dalam pembangunan yang berjalan

cukup lama pada masa Orde Baru yang menekankan pada pembangunan fisik dan kurang serius dalam pembinaan sumber daya manusia.

Dengan demikian, gagasan-gagasan tentang reformasi pendidikan di Indonesia menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas yang mesti dimulai dengan perbaikan pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang, dengan perbaikan komprehensif, baik pada wilayah makro dengan pengembangan regulasi, sistem dan berbagai kebijakan standarisasi pendidikan, maupun pada wilayah makro di tingkat sekolah dengan berbagai perbaikan dalam aspek perencanaan, proses pembelajaran, dukungan alat dan sarana, serta perbaikan manajemen, yang semuanya itu perlu dilakukan untuk mencapai perbaikan pada hasil pendidikan. Output pendidikan di Indonesia ke depan harus siap berkompetisi dalam memasuki pasar tenaga kerja yang tidak saja di dalam negeri tetapi juga di negara-negara lain di dunia. Mereka harus memiliki wawasan global, berpikir yang mendunia, memahami berbagai karakteristik kultur masyarakat dunia, memiliki penguasaan bahasa untuk komunikasi global, menguasai berbagai keterampilan dalam penggunaan alat-alat teknologi modern, serta memiliki basis keahlian yang sesuai serta relevan dengan kebutuhan pasar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **SEKOLAH DEMOKRATIS**

Isu tentang sekolah demokratis di Indonesia memang relatif baru dan belum terbiasa dalam wacana akademik bidang kependidikan, walaupun pekerjaannya sudah dimulai sejak lama, bahkan mungkin sejak zaman orde baru, walaupun belum spesifik. Istilah demokratis, sebagaimana dalam literatur politik diambil dari bahasa Yunani Kuno, yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang bermakna rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, dan apabila digabungkan menjadi bermakna kekuasaan di tangan rakyat (Tarcov, 1996:2). Istilah demokrasi memang negara nerada di tangan rakyat melalui undang-undang yang diputuskan rakyat, bukan oleh kekuasaan raja atau sultan. Kemudian, presiden diangkat oleh rakyat dan harus bertanggung jawab terhadap rakyat melalui mekanisme perwakilan.

Mekanismenya berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam kepemimpinan lembaga pendidikan, namun secara substantif, sekolah demokratis adalah membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam konteks ini James A. Beane dan Michael W. Apple, menjelaskan, berbagai kondisi yang sangat perlu dikembangkan dalam upaya membangun sekolah demokratis (Beane dan Apple, 1995:7) adalah:

1. Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin.
2. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah.
3. Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, problem-problem dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah.
4. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik.
5. Ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak minoritas.
6. Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan hidup manusia.
7. Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan mengembangkan cara-cara hidup demokratis.

Inti dari teori James A. Beane dan Michael W. Apple di atas adalah, bahwa sekolah demokratis itu akan terwujud jika semua informasi penting dapat dijangkau semua *stake holder* sekolah/madrasah, sehingga semua unsur tersebut memahami arah pengembangan sekolah/madrasah, berbagai problem yang dihadapinya, serta langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh. Dengan demikian, mereka akan bisa menganalisis relevansi kebijakan-kebijakan tersebut, memahami, mengkritisi dan memberi masukan, serta menentukan kontribusi dan partisipasi yang akan diberikannya untuk kesuksesan pelaksanaan program-program sekolah tersebut. Kemudian tidak cukup hanya sampai di situ, sekolah demokratis juga harus

dikembangkan dengan sikap *trust* atau kepercayaan, yakni orang tua percaya pada kepala sekolah untuk mengembangkan program-program sekolah menuju idealitas yang diinginkan, mengembangkan program-program kurikulumnya serta mengorganisir pelaksanaan program-programnya itu.

Pengembangan sekolah/madrasah menuju model sekolah demokratis ini relevan untuk dilakukan karena berbagai argumentasi, yang secara garis besar dapat dikategorisasi menjadi dua, yaitu tipologi sekolah abad ke-21, dan model pembelajaran yang sesuai. Dalam konteks pertama, Lyn Haas (Haas, 1994:21) menjelaskan, bahwa sekolah-sekolah sekarang harus dapat memenuhi beberapa kualifikasi ideal, yaitu:

1. Pendidikan untuk semua: yakni semua siswa harus memperoleh perlakuan yang sama, memperoleh pelajaran sehingga memperoleh peluang untuk mencapai kompetensi keilmuan sesuai batas-batas kurikuler, serta memiliki basis *skill* dan keterampilan yang sesuai dengan minat mereka, serta sesuai pula dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Paradigma yang memisahkan pendidikan akademik sebagai calon untuk memasuki perguruan tinggi, dan pendidikan keterampilan untuk memasuki pasar tenaga kerja, sudah tidak relevan lagi, karena perubahan yang menuntut masyarakat untuk menjadi bagian dari kontribusi untuk kemajuan.
2. Memberikan *skill* dan keterampilan yang sesuai dengan kemajuan teknologi terkini, karena pasar menuntut setiap tenaga kerjanya memiliki keterampilan penggunaan alat-alat teknologi termmodern, kemampuan komunikasi global, matematika, serta kemampuan akses pada pengetahuan.
3. Penekanan kerja sama, yakni menekankan pada pengalaman para siswa dalam melakukan kerja sama dengan yang lain, melalui penugasan-penugasan kelompok dalam proses pembelajaran, sehingga mereka memiliki pengalaman mengembangkan kerja sama, karena tren pasar ke depan adalah mengembangkan kerja sama, baik antara perusahaan, atau antara perusahaan dengan masyarakat dan yang lainnya, sehingga pengalaman mereka belajar akan sangat bermanfaat dalam artikulasi diri di lapangan profesi mereka.

4. Pengembangan kecerdasan ganda: yakni bahwa para siswa harus diberi kesempatan untuk mengembangkan *multiple intelligence* mereka, dengan memberikan peluang untuk mengembangkan *skill* dan keterampilan yang beragam, sehingga mudah melakukan penyesuaian di pasar tenaga kerja.
5. Integrasi program pendidikan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat, agar mereka memiliki kepekaan sosial.

Kelima *point* di atas memperlihatkan adanya tuntutan kurikulum yang dinamis, progresif dan peka terhadap berbagai kemajuan dan perkembangan teknologi di luar sekolah, sehingga jika kurikulum dan perencanaan sekolah itu sangat ditentukan oleh struktur birokrasi yang kaku, sekolah bisa tertinggal oleh kemajuan, dan sekolah akan kehilangan relevansinya dengan berbagai perubahan, yang pada akhirnya akan ditinggalkan oleh *stake holder*-nya sendiri. Oleh sebab itu, argumen-argumen di atas memperkuat bahwa model sekolah demokratis itu amat relevan untuk dikembangkan dalam era globalisasi yang semakin maju dan menantang ini. Dalam kaitan dengan persoalan demokratisasi yang diterapkan di sekolah, maka penempatan personil di semua tataran mesti sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk itu sistem yang dianut adalah bukan *like and dislike*, tetapi mesti *the right man on the right job*. Dengan demikian, pendidikan demokratis yang diterapkan di sekolah menjadi efektif. Untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan demokratis di sekolah, perlu dirancang kurikulum yang demokratis pula.

## **KURIKULUM DEMOKRATIS**

Semangat demokratis dalam penyelenggaraan sekolah akan menginspirasi bahwa publik sekolah memiliki hak yang sangat kuat dan sangat besar dalam penetapan arah kebijakan kurikulum sekolah, barangkali sama kuatnya dengan pemerintah sendiri, karena *client* sekolah adalah publiknya dan pemerintah sentah yang juga dalam konteks lain sebagai *user*, bukan terbatas dalam aspek penerimaan tenaga kerja pada instansi pemerintah saja, tetapi lapangan kerja secara lebih luas di semua sektor, pertanian, industri, jasa atau lainnya, di dalam negeri maupun diluar negeri. Semakin kompetitif IPM bangsa, maka akan semakin meningkat

*dignity* bangsa tersebut di hadapan bangsa-bangsa lainnya. Sebaliknya semakin merosot daya saingnya, maka akan semakin menurun pula *nation gignity*-nya. Dengan demikian, publik sekolah dan pemerintah sama-sama memiliki kepentingan dalam penetapan arah dan pendidikan anak-anak di sebuah sekolah. Kurikulum merupakan inti dari sebuah sekolah, karena kurikulumlah yang mereka tawarkan pada publiknya, dengan dukungan IPM guru berkualitas, serta sarana belajar lainnya yang memadai. Diskursus tentang kurikulum masih terus berjalan, apakah kurikulum itu hanya bermakna *Course Out Line* atau GBPP, atau mencakup seluruh pengalaman yang diberikan pada anak dalam proses pendidikannya oleh guru. Dalam konteks ini Ronald C. Doll menjelaskan bahwa kurikulum sudah tidak lagi bermakna sebagai rangkaian bahan yang akan dipelajari serta urutan pelajaran yang akan dipelajari siswa, tetapi seluruh pengalaman yang ditawarkan pada anak-anak peserta didik di bawah arahan dan bimbingan sekolah (Doll, 1964: 15). Pengalaman yang diperoleh siswa dari program-program yang ditawarkan sekolah amat variatif, tidak sebatas hanya pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga lapangan tempat mereka bermain di sekolah, kantin, dan bahkan di bis sekolah. Semua itu memberikan kontribusi pengembangan pengalaman siswa, yang memengaruhi perubahan-perubahan pada mereka.

Melalui kesimpulannya ini, Doll hendak menegaskan bahwa kurikulum itu adalah perencanaan yang ditawarkan, bukan yang diberikan, karena pengalaman yang diberikan guru belum tentu ditawarkan. Dengan demikian seluruh konsep pendidikan di sekolah itu bisa dan harus ideal. Kurikulum harus bicara keharusan, dan bukan kemungkinan. Kemudian bimbingan dan arahan tidak saja tugas dan kewajiban guru, tetapi menjadi tugas dan kewajiban sekolah, yang komponennya tidak sekedar guru, tetapi juga kepala sekolah, karyawan sekolah dan juga unsur lain yang terkait langsung dengan proses pendidikan. Sesuai pengertian di atas, maka kurikulum, sebagaimana dikemukakan Sukmadinata memiliki beberapa karakteristik (Sukmadinata, 1997:27), yaitu:

1. Kurikulum sebagai suatu substansi, yakni bahwa kurikulum adalah sebuah rencana kegiatan belajar para siswa di sekolah, yang mencakup rumusan-rumusan tujuan, bahan ajar, proses kegiatan pembelajaran, jadwal dan evaluasi

- hasil belajar. kurikulum tersebut merupakan sebuah konsep yang telah disusun oleh para ahli dan disetujui oleh pengambil kebijakan pendidikan serta oleh masyarakat sebagai *user* dari hasil pendidikan.
2. Kurikulum sebagai sebuah sistem, yakni bahwa kurikulum merupakan rangkaian konsep tentang berbagai kegiatan pembelajaran yang masing-masing unit kegiatan memiliki keterkaitan secara koheren dengan lainnya, dan bahwa kurikulum itu sendiri memiliki keterkaitan dengan semua unsur dalam sistem pendidikan secara keseluruhan.
  3. Kurikulum merupakan sebuah konsep yang dinamis, yakni bahwa kurikulum merupakan konsep yang terbuka dalam berbagai gagasan perubahan serta penyesuaian-penyesuaian dengan tuntutan pasar atau tuntutan idealisme pengembangan peradaban umat manusia.

Kurikulum memang merupakan jantungnya pendidikan, dengan kurikulum, sekolah dapat menggambarkan dan merumuskan kualifikasi dan kompetensi *outcome* dari program pendidikannya, dan dengan kurikulum pulalah, sekolah merancang upaya-upaya untuk mencapai kompetensi tersebut (Wiles, 1989:31). Kurikulum merupakan salah satu yang dijual sekolah pada pelanggannya, semakin baik kurikulum yang dirancang sekolah, maka akan tinggi daya tarik sekolah tersebut bagi masyarakat. Kemudian kurikulum pulalah yang menjadi salah satu *quality assurance* dari sekolah, dan dikontrol dengan efektif oleh guru dengan kepala sekolahnya, dan dirumuskan bersama antara manajemen sekolah, *stake holder* serta unsur-unsur masyarakat lain yang memberikan dukungan pada sekolah tersebut.

Secara empiris, perhatian manajemen sekolah, dan bahkan juga pemerintah terhadap kurikulum yang disusun secara sistematis untuk menuntun para siswa untuk mencapai tujuan yang ideal cukup baik. Secara teoretis, pengorganisasian kurikulum bisa dilakukan dalam salah satu dari berbagai pilihan yang pernah dikembangkan dalam dunia pendidikan ,yaitu *subject centered curriculum*, *board field* dan *core curriculum*, yang menurut Keneth yang dikutip Dede Rosyada (2007 : 43 ) ketiganya memiliki keterkaitan dialektika historis. *Subject centered curriculum* merupakan bentuk tertua yang pernah dipakai dalam pendidikan (

Henson, 1995 : 153). Apapun bentuk atau model kurikulum yang disusun dan diterapkan di sekolah, yang terpenting adalah dapat menjawab tuntutan pendidikan di era globalisasi yang semakin maju kompetitif dan menantang ini. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan juga mesti mempersiapkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan secara profesional, sehingga tujuan pembelajaran dapat terwujud sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **KESIMPULAN**

Demokratisasi mesti dimulai dari proses evaluasi dan pengembangan kurikulum, dan tidak hanya dalam konteks penyusunan kurikulum sekolah secara komprehensif, tapi juga dalam proses implementasinya pada setiap mata pelajaran di setiap level tertentu. Sebaiknya guru melakukan uji kompetensi pada setiap awal pembelajaran untuk menetapkan batas-batas awal kurikulum yang mesti dibelajarkan, serta mengukur waktu yang diperlukan untuk mencapai batas kompetensi tertentu dengan kualitas input yang mereka terima. Semua itu sebaiknya disampaikan pada orang tua dari setiap siswa oleh kepala sekolah, sehingga risiko biaya bisa dibicarakan bersama. Itulah salah satu bentuk demokratisasi pendidikan dalam konteks penetapan kebijakan silabus yang akan diajarkan guru pada siswanya. Demokratisasi juga mesti dikembangkan pada proses pembelajaran. Guru tidak boleh membiarkan ada siswa yang tertinggal dalam kelasnya, dan guru juga tidak boleh mengurangi pelayanan terhadap siswa-siswanya yang memiliki kemampuan daya serap lebih baik dan lebih cepat dari lainnya. Proses pembelajaran mesti demokratis, yakni semua siswa dalam semua kategori mendapat layanan yang wajar dari guru, bahkan guru sebaiknya bertanya kepada siswanya tentang pokok bahasan yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya bentuk penugasannya mesti dibahas bersama sehingga sampai pada kesepakatan dengan tidak mengabaikan tujuan pembelajaran, dan target-target kurikuler yang mesti dicapai. Pendekatan *kolaborative learning* tersebut semata dikembangkan untuk menumbuhkan rasa memiliki siswa terhadap program pembelajaran yaitu,

serta memberikan penghargaan yang wajar pada siswa, sehingga gairah mereka untuk belajar bisa terus ditingkatkan, sehingga output sekolah dapat berkompetisi di era globalisasi yang memiliki kompleksitas permasalahan menantang ini.

## KEPUSTAKAAN

Apple, Michael W, James, A, (Beane,(1995), The Case of Democratic School  
In,

Michael Apple, Michael, W And James A, Beane, Democratic School, ASCD,  
Alexandrea Virginia

Haas, Lyn (1994), School for the Twenty First century, In William, James Mathis  
et all (ed), Education Renewal, Vermont Restructuring in Collaborative,  
Holistic education press.

Dede Rosyada, (2007) Paradigma Pendidikan Demokratis: sebuah Model Perlibatan  
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Priatmono, Dody Heriawan, (2003), Reformasi pendidikan Indonesia: Suatu Solusi  
Keluar Dari krisis.

Tarcov, Nathan, (1996) , The meaning of Democracy In Roger Soder, Democracy  
Education and School, Jossey Bass, San Fransisco.

Wiles, John, (1989), Curriculum Dvelopment: a Guide to Practice, Publishing  
Company Columbus, Ohio, USA.

Yulealawati, Ella, 2003, pembelajaran dan penilaian Berdasarkan dan penilaian  
Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Pusat Kurikulum Depdiknas.

Zamroni, Paradigma pendidikan masa Depan, Bigraf Publishing, 2000,  
Yogyakarta.